

**Departemen Kementerian Pendidikan Tinggi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN
BUMD DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI SE-KOTA DI PROVINSI LAMPUNG
2000-2012**

Disusun Oleh:

**NAMA : BELLA CHINTYA EDWIN
NPM : 1011031037
KONS : AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PEM.1 : Drs. A. ZUBAIDI INDRA, M.M., C.P.A.
PEM 2 : RETNO YUNI N.S., S.E., M.SC., AKT
PEMBAHAS : DR. RINDU RIKA GAMAYUNI., S.E., M.SI**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2014**

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN BUMD DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SE-KOTA DI PROVINSI LAMPUNG 2000-2012

Oleh

BELLA CHINTYA EDWIN

Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan paling penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan pendapatan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data runtun waktu data tahunan dari tahun 2000-2012. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan uji regresi linier berganda, *Ordinary Least Square* (OLS) dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung, variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung, variabel pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, pendapatan lainnya *Ordinary Least Square* (OLS).

Nama : Bella Chintya Edwin
NPM : 101103037
Telpon : 02975456226
Email : bellachintyaedwin@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan paling penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI nomor.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang menyatakan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

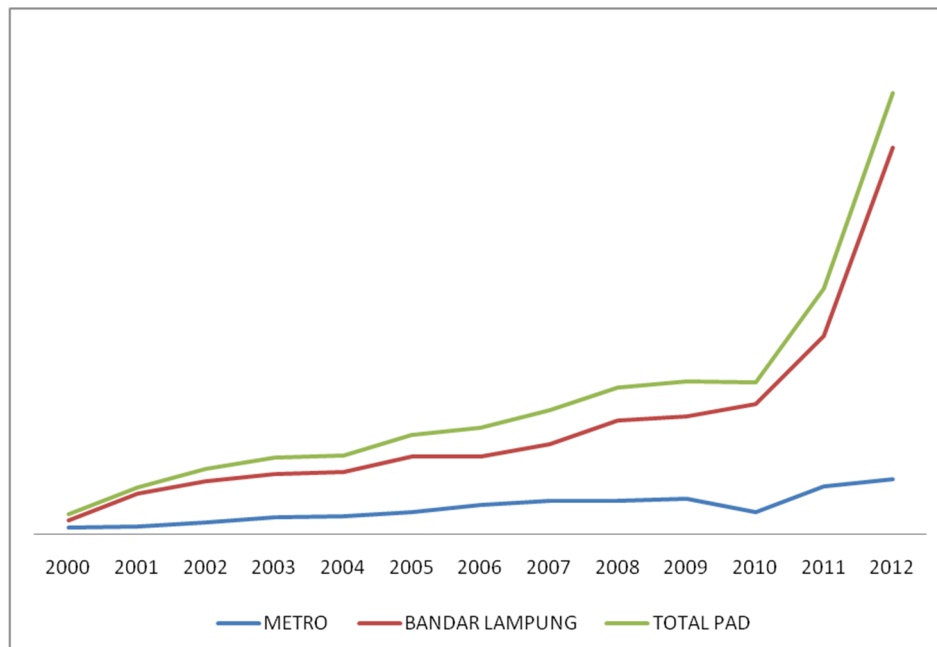
Berikut akan disajikan tabel yang akan menggambarkan total perolehan Pendapatan Asli Daerah Se-Kota Di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro selama Tahun 2000-2012.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN	SE-KOTA		TOTAL PAD
	BANDAR LAMPUNG	METRO	
2000	21.682,34	3.025,97	24.708,31
2001	25.696,67	7.948,01	33.644,68
2002	32.986,28	9.598,01	42.584,29
2003	36.511,79	12.098,05	48.609,84
2004	41.689,58	17.214,30	58.903,88
2005	49.073,49	18.703,17	67.776,66
2006	52.537,25	22.343,36	74.880,61
2007	55.540,34	24.541,92	80.082,26
2008	70.660,00	27.372,52	98.032,52
2009	77.731,00	29.045,20	106.776,20
2010	82.628,00	65.802,90	148.430,90
2011	116.044,00	46.822,00	162.866,00
2012	202.920,00	50.160,00	253.080,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2012

Grafik 1. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung, Metro dan Se-Kota Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2012

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah merupakan sumber kekayaan terbesar suatu daerah yang dapat digunakan untuk proses percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Ernawati, 2010). Besarnya penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi pada proses pertumbuhan ekonomi daerah (Amiel et al., 2010).

Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003). Serupa dengan pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan daerah yang akan dikelola daerah untuk proses percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (Ernawati, 2010).

Pendapatan BUMD merupakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Halim, 2004). Pengalokasian sumber daya fiskal yang baik termasuk pendapatan BUMD akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional (Zhang dan Zou, 1997).

Demikian pula dengan pendapatan lain-lain daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim, 2004). Pengalokasian pendapatan lain-lain daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah juga akan berpengaruh pada pertumbuhan suatu daerah tersebut (Zulyanto, 2010).

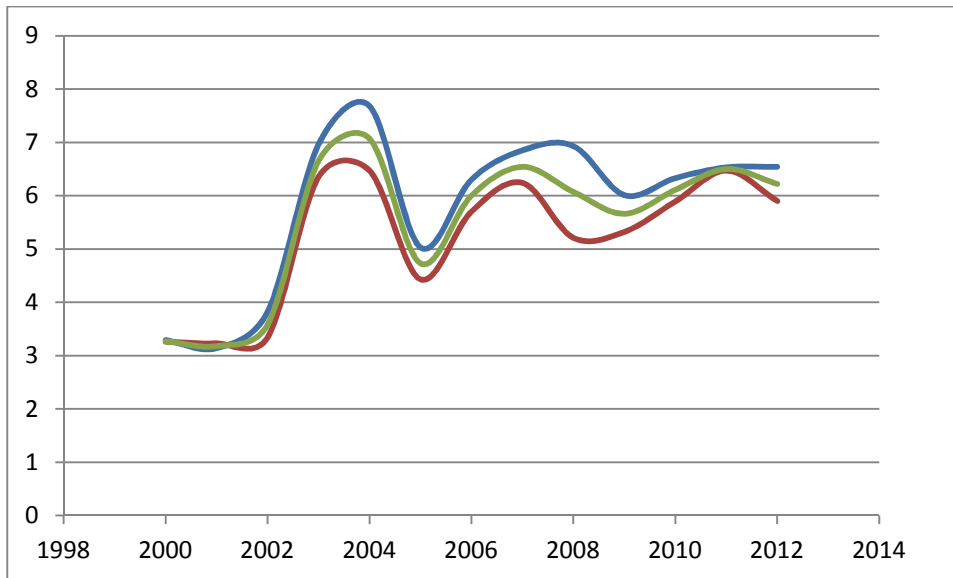
Pertumbuhan ekonomi merupakan keseluruhan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi suatu negara atau suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi didalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 (Dalam Persen)

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SE-KOTA		RATA-RATA LAJU PDRB KOTA
	BANDAR LAMPUNG	METRO	
2000	3,29	3,26	3,27
2001	3,14	3,23	3,18
2002	3,82	3,34	3,58
2003	6,96	6,35	6,65
2004	7,68	6,47	7,07
2005	5,03	4,43	4,73
2006	6,30	5,70	6
2007	6,85	6,24	6,54
2008	6,93	5,21	6,07
2009	6,01	5,32	5,66
2010	6,33	5,89	6,11
2011	6,53	6,47	6,5
2012	6,54	5,90	6,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Kota dan Rata-rata Laju PDRB Kota Metro Tahun 2000-2012 (Dalam Persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012

Penelitian ini memperluas penelitian dari Ernawati (2009) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Penelitian ini telah menambah dua variabel yang berbeda dari penelitian Ernawati (2009) yaitu pendapatan BUMD dan Lain-Lain PAD yang sah, penelitian ini mengambil Kota Metro dan Kota Bandar Lampung karena merupakan salah satu pusat pemerintahan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD Dan Pendapatan Lain Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
3. Apakah Pendapatan BUMD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
4. Apakah Pendapatan lain daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:1).

2.2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

2.3. Pengertian Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a). Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b). Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c). Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan (Pendapatan dari BUMD)

Menurut Halim (2004) “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.”

Undang-undang no 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

2.5. Lain-Lain PAD yang Sah

UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2004), “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.”

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) penerimaan jasa giro,
- 3) penerimaan bunga deposito,
- 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah.”

2.6. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan bahwa kebanyakan studi yang mempelajari hubungan langsung desentralisasi fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi, pendapatan BUMD, serta pendapatan lain daerah dan pertumbuhan ekonomi menerapkan Model pertumbuhan endogenous Barro (*Barro's Endogenous Growth Model*), dimana fungsi produksi terdiri dari berbagai input termasuk modal swasta, dan pengeluaran publik dalam tiga tingkatan pemerintah. Namun dalam beberapa studi yang lain, seperti Davoodi dan Zou (1998) menggunakan variabel kondisi Levine-Renelt (*Levine-Renelt conditioning variables*) atau model pertumbuhan Solow meliputi investasi pemerintah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk menguji kerapuhan (*fragility*) estimasi desentralisasi fiskal. Berkaitan dengan level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Barry dan Jules (2008) menjelaskan bahwa variabel ini penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi karena digunakan untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan initial perkapita regional GDP yaitu komponen

pendapatan pemerintah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan.

2. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

1. Metode langsung

- a. Pendekatan Produksi
- b. Pendekatan Pendapatan
- c. Pendekatan Pengeluaran

2. Metode tidak langsung

Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constan price*). Baik PDRB harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, 2004).

PDRB atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi didalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/ pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi (Kuncoro, 2004).

2.7 Model Penelitian

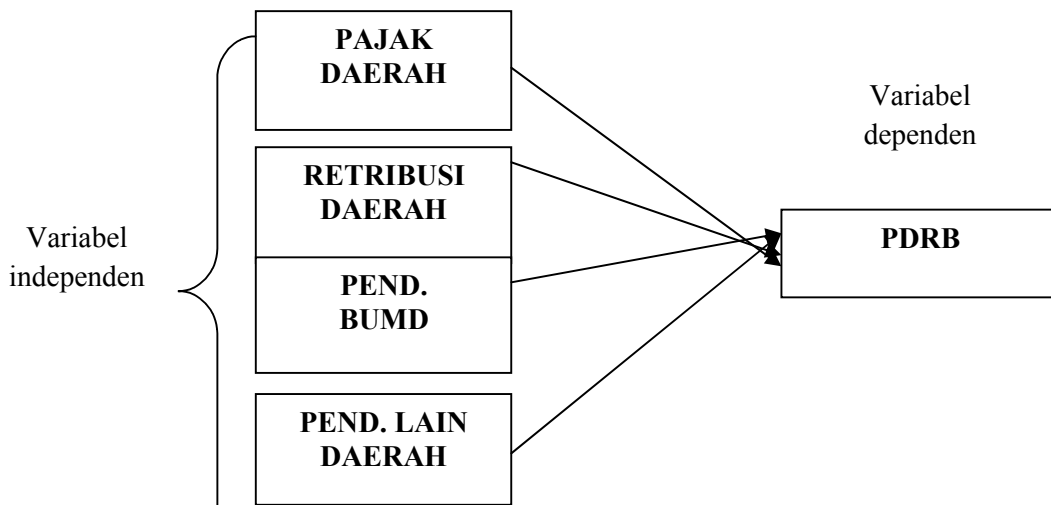
Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, pembagian tugas dan wewenang tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Untuk itu daerah perlu menggali sumber-sumber pajak, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah yang cukup dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Produktivitas masyarakat daerah dalam rangka pembangunan daerah akan mewujudkan suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berakhir pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi didalam daerah

tersebut (Kuncoro, 2004).



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD Dan Pendapatan Lain Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak Daerah

Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya maka semakin tinggi pula PDRB suatu daerah dan dapat dikatakan bahwa semakin makmur dan sejahtera suatu daerah tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Amiel et al., (2010) melakukan penelitian yang sama tentang pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

HI: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.8.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah

Sebagaimana yang dimaksudkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemerian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003).

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun penelitian yang juga dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) telah menunjukkan hasil bahwa alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari retribusi daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.8.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan BUMD

Pendapatan BUMD merupakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (Halim, 2004). Pendapatan BUMD akan meningkatkan sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi satu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) tentang pertumbuhan ekonomi di Cina menunjukkan hasil tentang bagaimana alokasi sumber daya fiskal yaitu pendapatan BUMD memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan BUMD dengan pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3: Pendapatan BUMD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.8.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Lain Daerah

Pendapatan lain daerah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim, 2004).

Penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian serupa yang dilakukan Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai alokasi sumberdaya fiskal yang dilakukan serentak di 46 negara berkembang, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan lain daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H4: Pendapatan lain daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD, Pendapatan Lain Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Departemen Jendral Perimbangan dan Keuangan RI, Bank Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Kajian Regional Bank Indonesia dan berbagai instansi serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Pengertian dan batasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari:

1. Pajak Daerah (Rupiah)
Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pajak Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
2. Retribusi Daerah (Rupiah)
Retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan retribusi daerah Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012
3. Pendapatan BUMD (Rupiah)
Pendapatan BUMD yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pendapatan BUMD Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
4. Lain-lain PAD yang sah (Rupiah)
Lain-lain PAD yang sah dalam penelitian ini adalah total seluruh penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012

b. Variabel Terikat

Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

Laju pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas harga konstan Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel yang digunakan dan untuk mengetahui respon variabel

bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan lain-lain PAD yang sah terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Seluruh data yang digunakan dimasukkan dalam program statistik komputer yaitu SPSS 20 untuk dilakukan pengujian.

Untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan lain-lain pad yang sah terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi digunakan persamaan regresi linier berganda (Gujarati, 1997). Dengan regresi dasarnya sebagai berikut:

$$= + + + + +$$

Dan diaplikasi terhadap variabel:

$$= + + + + +$$

Keterangan:

- PDRB : Laju Pertumbuhan Ekonomi Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- PD : Total Pajak Daerah Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- RD : Total Retribusi Daerah Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- BUMD : Total pendapatan BUMD Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- PLD : Total pendapatan lain-lain daerah yang sah Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- ϵ : Standar Error.
- $\beta_0 \dots \beta_1$: Koefisien yang diestimasi.

3.3. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, normalitas, autokolerasi dan heteroskedatisitas. Model regresi ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat multikolinearitas, autokolerasi, normalitas dan heteroskedatisitas.

Apabila model yang digunakan terjadi multikolinearitas, autokolerasi, normalitas dan heteroskedatisitas maka regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan bias dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak valid (Gujarati, 1997 : 43). Dengan program SPSS.20 maka dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, autokolerasi, normalitas dan juga heteroskedatisitas.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) dari masing-masing variabel, (Ghozali,2011). Variabel yang digunakan meliputi variabel pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah. Dari data satu variabel dependen dan empat variabel independen tersebut, diujilah pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pertumbuhan ekonomi	26	3.14	7.68	5.5084	1.25409
pajak daerah	26	511.29	156861.00	22708.0746	33538.76530
retribusi daerah	26	3025.97	21142.00	11948.3793	5024.33957
pendapatan bumd	26	.00	36671.90	4365.1706	6910.29522
pendapatan lain	26	.00	21993.00	7229.4212	5638.85531
Valid N (listwise)	26				

Sumber: data yang telah diolah, *SPSS 20*

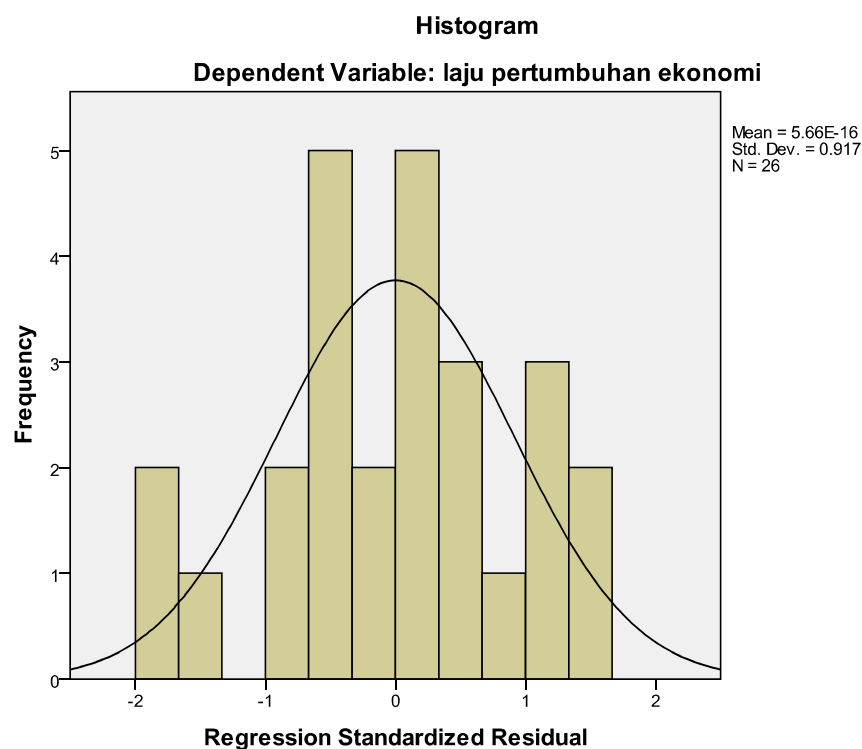
1. Output tabel 3 di atas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 26 sampel. PDRB sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar 5.5084 yang artinya rata-rata kontribusi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5.508% dengan nilai maksimum sebesar 7.68% pada tahun 2004 oleh Kota Bandar Lampung. Nilai minimum 3.14% pada tahun 2001 oleh Kota Bandar Lampung.
2. Variabel independen pajak daerah berjumlah 26 sample. Dengan nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 2.270.807.460. Nilai maksimum sebesar Rp 156.861.000.000 pada tahun 2012 oleh Kota Bandar Lampung. Nilai minimum sebesar Rp 511.290.000 pada tahun 2000 oleh Kota Metro
3. Variabel retribusi daerah berjumlah 26 sample. Dengan nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 11.948.379.300. Nilai maksimum sebesar Rp 21.142.000.000 pada tahun 2012 oleh Kota Bandar Lampung. Nilai minimum sebesar Rp 302.597.000 pada tahun 2000 oleh Kota Metro.
4. Variabel pendapatan BUMD berjumlah 26 sample. Dengan nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 4.365.170.600. Nilai maksimum sebesar Rp 36.671.900.000 pada tahun 2010 oleh Kota Metro. Nilai minimum sebesar Rp 00 pada tahun 2000 oleh Kota Metro.
5. Variabel pendapatan lain daerah berjumlah 26 sample. Dengan nilai mean atau rata-ratanya sebesar Rp 7.229.421.200. Nilai maksimum sebesar Rp 21.993.000.000 pada tahun 2012 oleh Kota Metro.

Nilai minimum sebesar Rp 00 pada tahun 2000 oleh Kota Metro. Hasil ini menunjukkan bahwa tentang ukuran-ukuran statistik mengenai ukuran pusat, ukuran sebaran, dan ukuran lokasi dari persebaran/distribusi data masing-masing variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah. (Ghozali, 2011)

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik normal probability plot dan uji statistic non-parametrik kolmogorov-smirnov (K-S). Dalam analisis grafik, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

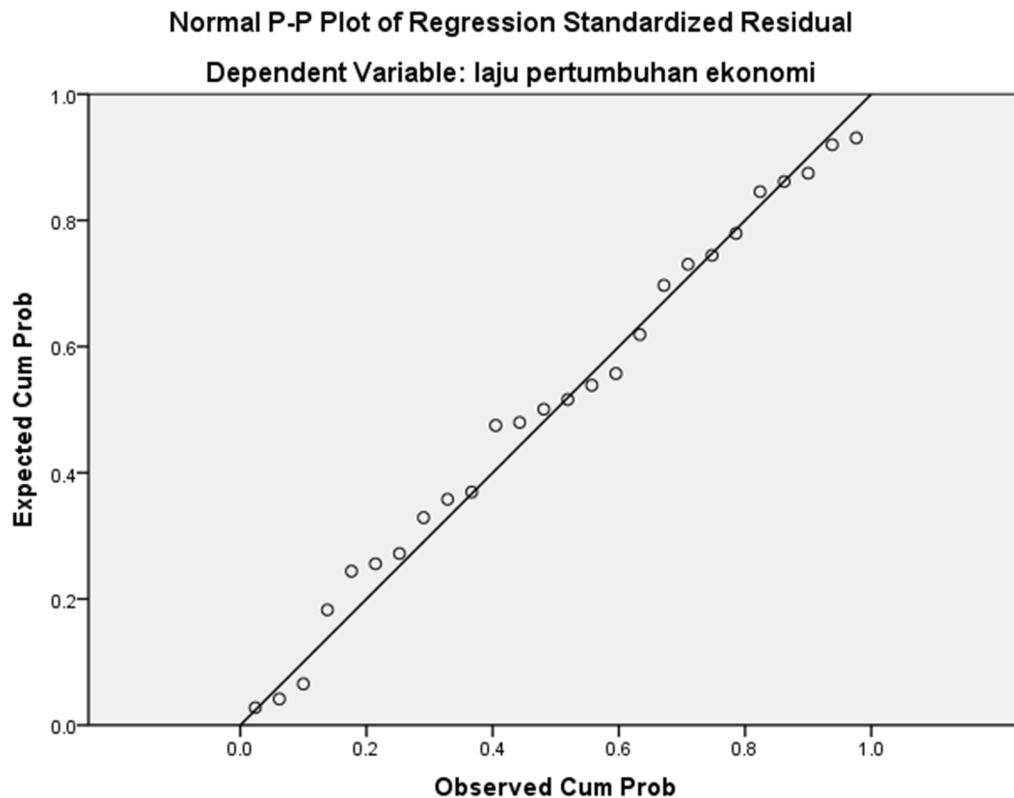


Gambar 4. Grafik Histogram

Sumber: data yang telah diolah, SPSS 20

Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa tampilan grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal. Hal ini didukung dengan gambar pada *normal probability plot* dengan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau

memenuhi asumsi normalitas. Berikut tampilan *normal probability plot* yang ditunjukkan dalam gambar 3.



Gambar 5. Grafik Normal P-Plot Regression Standardized Residual

Sumber: data yang telah diolah, *SPSS 20*

4.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* dibawah 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.870	.551		5.209	.000		
	pajak daerah	5.141E-7	.000	.014	.075	.941	.521	1.921
	retribusi daerah	.000	.000	.834	2.611	.016	.174	5.761
	pendapatan bumd	-1.069E-5	.000	-.059	-.384	.705	.751	1.331

pendapatan lain daerah	-7.321E-6	.000	-.033	-.133	.896	.287	3.479
------------------------	-----------	------	-------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: laju pertumbuhan ekonomi

Sumber: data yang telah diolah, SPSS 20

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah memiliki nilai *tolerance* berada di atas 0,1 yaitu sebesar 0.521, 0.174, 0.751, 0.287 dan nilai VIF dibawah angka 10 yaitu sebesar 1.921, 5.761, 1.331, 3.479 sehingga tidak ada gangguan multikolinieritas antar variabel independen tersebut.

4.2.3. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, yang dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson dengan acuan sebagai berikut:

Tabel 5. Dasar Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Hipotesis nol	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	$4 - d_U = d = 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber: Ghozali, 2009

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test) untuk uji asumsi autokorelasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.793 ^a	.628	.557	.83431	2.020

a. Predictors: (Constant), pendapatan lain daerah, pendapatan bumd, retribusi daerah, pajak daerah

b. Dependent Variable: laju pertumbuhan ekonomi

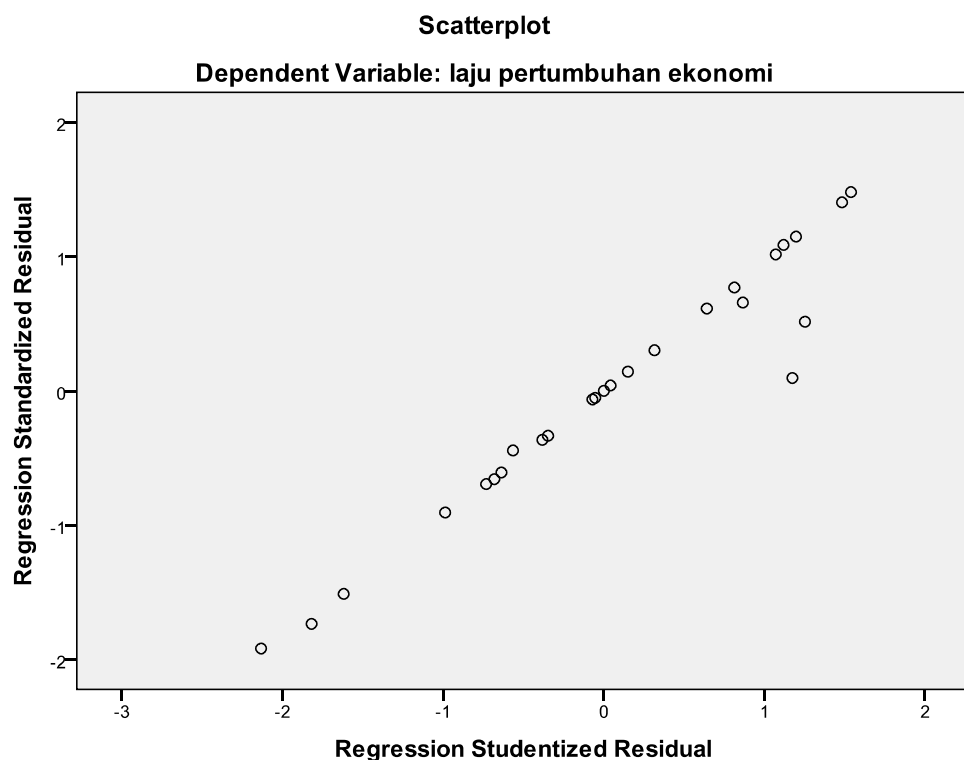
Sumber: data yang telah diolah, SPSS 20

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi jika mempunyai nilai *Durbin-Watson* (DW) yang berada di antara $d_U < d < 4 - d_U$. pada tabel 4.5 diatas variable pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, pendapatan lain daerah memiliki nilai d_U sebesar 1.759, DW sebesar 2.020 dan $4 - d_U$ sebesar

2.241 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model tersebut.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi keridaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedatisitas. Penelitian ini menggunakan cara melihat grafik plot dan pengujian statistic yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedatisitas.



Gambar 6. Grafik Scatterplot

Sumber: data yang telah diolah, *SPSS 20*

Melihat grafik scatterplot di atas, pola titik-titik yang ada menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Spearman's rho

			Correlations				
			Unstan dardize d Residu al	pajak daerah	retribus i daerah	pendap atan bumd	pendap atan lain daerah
Spearma n's rho	Unstandar d Residual	Correlation Coefficient Sig. (2- tailed) N	1.000 .846 26	.040 .846 26	-.045 .828 26	-.047 .820 26	-.083 .687 26
	pajak daerah	Correlation Coefficient Sig. (2- tailed) N	.040 .846 26	1.000 .000 26	.724** .000 26	.693** .000 26	.369 .064 26
	retribusi daerah	Correlation Coefficient Sig. (2- tailed) N	-.045 .828 26	.724** .000 26	1.000 .000 26	.960** .000 26	.881** .000 26
	pendapatan bumd	Correlation Coefficient Sig. (2- tailed) N	-.047 .820 26	.693** .000 26	.960** .000 26	1.000 .000 26	.869** .000 26
	pendapatan lain daerah	Correlation Coefficient Sig. (2- tailed) N	-.083 .687 26	.369 .064 26	.881** .000 26	.869** .000 26	1.000 .000 26

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara variabel pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya dengan *unstandardized residual* masing-masing menghasilkan nilai signifikansi 0,846, 0,828, 0,820, 0,687. Karena masing-masing nilai signifikansi korelasi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedatisitas.

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji linear berganda. Uji regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan serta arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini:

- H1:** Pajak daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung.
- H2 :** Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung.
- H3 :** Pendapatan BUMD berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung.
- H4 :** Pendapatan lain daerah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel hasil uji hipotesis dibawah ini:

**Tabel 8. Hasil Regresi linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.870	.551		5.209	.000
	pajak daerah	5.141E-7	.000	.014	.075	.941
	retribusi daerah	.000	.000	.834	2.611	.016
	pendapatan bumd	-1.069E-5	.000	-.059	-.384	.705
	pendapatan lain daerah	-7.321E-6	.000	-.033	-.133	.896

a. Dependent Variable: laju pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data yang telah diolah, *SPSS 20*

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 2.870 + 5.141 \text{ E-}7 \text{ PD} + 0.000 \text{ RD} - 1.069 \text{ E-}5 \text{ BUMD} - 7.321 \text{ E-}6 \text{ PL} + \varepsilon$$

Keterangan :

- PDRB : Laju Pertumbuhan Ekonomi Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- PD : Total Pajak Daerah Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- RD : Total Retribusi Daerah Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
- BUMD : Total pendapatan BUMD Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.

- PLD : Total pendapatan lain-lain daerah yang sah Se- Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
 ϵ : Standar Error.

Dari hasil persamaan regresi yang dibentuk, koefisien konstanta bernilai 2.870, artinya nilai laju pertumbuhan ekonomi akan bernilai 2.870 jika pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, pendapatan lain daerah bernilai 0.

Tabel 9. Hasil Uji Anova
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.701	4	6.175	8.872	.000 ^a
	Residual	14.617	21	.696		
	Total	39.319	25			

a. Predictors: (Constant), pendapatan lain daerah, pendapatan bumd, retribusi daerah, pajak daerah

b. Dependent Variable: laju pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data yang telah diolah, *SPSS 20*

Dari hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai F sebesar 8.872 dan tingkat probabilitas 0.000. Probabilitas model penelitian ini kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 ^a	.628	.557	.83431

a. Predictors: (Constant), pendapatan lain daerah, pendapatan bumd, retribusi daerah, pajak daerah

b. Dependent Variable: laju pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data yang telah diolah, *SPSS 20*

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda ini didukung oleh pengujian keberartian model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan menggunakan pengujian koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *Adjusted R²* agar dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik, (Ghozali, 2012). Berikut adalah tabel hasil uji pengujian tersebut:

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 8 di atas diperoleh angka R^2 (R-squared) sebesar 0.557 atau 55.70%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas sebesar 55.70% atau variasi variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian (PD, RD, BUMD, PLD) mampu menjelaskan 55.70% variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) sedangkan sisanya 44.30% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

- **Hipotesis 1**

- **Pengaruh Pajak Daerah (PD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, koefisien regresi untuk variabel pajak daerah menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 5.141×10^{-7} . Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh pajak daerah (PD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) menunjukkan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel pajak daerah (PD) sebesar 0.075 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 1.721 dengan tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$) 95%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amiel et al., (2010) yang memperoleh hasil memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010, Tao Zhang dan Heng-fu Zou (1997) dan Zulyanto (2010) yang memperoleh hasil yang positif mengenai alokasi sumber daya fiskal yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak, retribusi, pendapatan BUMD, pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian yang dilakukan Ernawati (2009) yang menemukan bahwa adanya hubungan positif antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Namun hasil penelitian yang tidak signifikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa banyak daerah otonom yang tidak memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan demikian, banyak daerah yang tergantung pada Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat, contohnya dana alokasi umum tahun 2012 untuk Kota Bandar Lampung sebesar Rp 762.655.000.000 dan Kota Metro Rp 330.158.000.000. Hal ini yang menyebabkan fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah sehingga pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan BUMD dan Pendapatan Lain Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta penelitian yang dilakukan Setiaji dan Adi (2007), Susilo dan Adi (2007) dalam Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga menyebabkan tidak adanya peningkatan peran PAD yang signifikan seharusnya kontribusi PAD dapat menimbulkan kemandirian daerah serta pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya daerah semakin tergantung pada Dana Perimbangan pemerintah pusat. Dengan demikian, pajak daerah (PD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan jumlah pajak daerah sebesar 1 persen, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah kota di Provinsi Lampung akan meningkat sebesar 5.141×10^{-7} .

- **Hipotesis 2**

- **Pengaruh Retribusi Daerah (RD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 0.000. Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh retribusi daerah (RD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel retribusi daerah sebesar 2.611 lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 1.721 dengan tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$) 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Retribusi Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung tahun 2000-2012.

- **Hipotesis 3**

- **Pengaruh Pendapatan BUMD (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, koefisien regresi untuk variabel pendapatan BUMD (BUMD) menunjukkan tanda negatif yaitu sebesar $1.069 \text{ E-}5$.

Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh pendapatan BUMD (BUMD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) menunjukkan angka yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan BUMD sebesar 0.384 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 1.721 dengan tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$) 95%.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Davoodi dan Zou (1998) yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang. Serta penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa banyak daerah otonom yang tidak memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan demikian, banyak daerah yang tergantung pada Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat yang menyebabkan fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah sehingga pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan BUMD dan Pendapatan Lain Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pendapatan BUMD (BUMD) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan jumlah pendapatan BUMD sebesar 1 persen, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah kota di Provinsi Lampung akan meningkat sebesar $1.069 \text{ E-}5$.

- **Hipotesis 4**

- **Pengaruh Pendapatan Lain Daerah (PLD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, koefisien regresi untuk variabel pendapatan lain daerah (PLD) menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar $7.321 \text{ E-}6$.

Berdasarkan uji signifikansi parsial, pengaruh pendapatan lain daerah (PLD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) menunjukkan angka yang tidak

signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan lain daerah (PLD) sebesar 0.133 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} sebesar 1.721 dengan tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$) 95%.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Davoodi dan Zou (1998) yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang serta penelitian yang dilakukan oleh Setiaji dan Adi (2007), Susilo dan Adi (2007) dalam Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga menyebabkan tidak adanya peningkatan peran PAD yang signifikan seharusnya kontribusi PAD dapat menimbulkan kemandirian daerah serta pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya daerah semakin tergantung pada Dana Perimbangan pemerintah pusat. Dengan demikian, pendapatan lain daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hal ini berarti bahwa dengan kenaikan jumlah pendapatan lain daerah sebesar 1 persen, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah kota di Provinsi Lampung akan meningkat sebesar $7.321 \text{ E-}6$.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pajak daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengalokasian pajak daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja rutin bukan digunakan untuk belanja infrastruktur yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini menimbulkan ketergantungan yang semakin besar terhadap Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Seknas Fitra yang mendapatkan hasil bahwa 50% APBD digunakan untuk membiayai belanja rutin (belanja pegawai) dan sumber keuangan terbesar pemerintah daerah berasal dari DAU.
2. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang pengalokasiannya banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Frenadin bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi yang relatif kecil hanya sekitar 22% dalam APBD namun lebih banyak digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, sebagai masukan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Se-Kota Di Provinsi Lampung di harapkan dapat lebih meningkatkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dengan optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Masyarakat di Provinsi Lampung di harapkan dapat mengawasi jalannya pembangunan di daerah tersebut guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, Frenadin., Syofiarti dan Fatimah Titin. 2011. *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Tesis.
- Adi, Priyo Hari dan Puspa Dewi Ekaristi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 6-Nomer 1, Juni 2009*.
- Amiel, Lindsay., Deller, Steven., dan Stallman., Judith. 2012. Economic Growth And Tax And Expenditure Limitations. *Journal of Southren Regional Science Association. 42, 185-206*.
- Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi Regional*.2013
- Barry W. Poulson and Jules Gordon Kaplan, State Income Taxes and Economic Growth., *Cato Journal, Vol. 28, No. 1 (Winter 2008)*.
- Davoodi, Hamid dan Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*.
- Ernawati. 2009. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 1995. *Basic Econometrika*. Third Edition. McGrawHill Companies, Inc. New York.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Jhingan, ML,. 2004. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Julianto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Thesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kadkatmiko, 2002. Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam

Membiayai Pembangunan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, hal.69.

- Kuncoro, 2004. *Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Kusnandar dan Siswantoro, Didik. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembayaran Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Thesis*. Universitas Indonesia.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran, Cetakan Pertama*, UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2007 tentang otonomi daerah.
- Rustiadi, dkk, 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Institut Pertanian Bogor.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Seknas Fitra, 2011. Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Artikel
- Setiaji, Wiriawan dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar*.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (studi empiris di Provinsi Jawa Tengah). *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.
- Suandy, Early. 2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Trihendradi, C. 2011. *Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik*

Menggunakan SPSS 19. Andi, Yogyakarta.

Undang-undang nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 J.O undang-undang nomer 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Vazquez, M Jorge dan McNab M Robert, 2001. Fiscal Desentralization & Economic Growth., *Working Paper #01-1, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.*

Woller, M Gary dan Phillips Kerk, 1998. Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion., *The Journal of Developmnet Studies; April 1998;34,4.*

Zhang, Tao dan Heng-fu Zou. 1997. Fiscal Decentralization, Publik Spending, and Economic Growth In China. *Journal of Public Economucs. Washington DC.*